

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pada awal abad ke-20 merupakan bagian dari negara-negara yang mengalami perkembangan kemodernan dengan selang waktu tertentu. Beberapa kota-kota yang terletak di berbagai wilayah di Indonesia bisa di katakan jauh dari wacana-wacana kemodernan, namun perjalanan kota-kota Indonesia sepanjang abad-20 harus di pandang secara berimbang dikarenakan mempunyai keunikan secara tersendiri¹. Ujung Pandang merupakan salah satu kota yang berada di Indonesia yang telah mengalami perkembangan sebagai kota modern sejak masa kolonial. Sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur, pertumbuhan Ujung Pandang dipengaruhi oleh perubahan politik dan ekonomi yang muncul akibat campur tangan Eropa dan dinamika penguasa kerajaan Ujung Pandang.² Pada tahun 1906, Ujung Pandang diakui sebagai salah satu kota yang berbadan otonom dengan demikian inilah salah satu era baru di mana adanya kewenangan yang dimiliki sebuah tata pemerintahan kota yang tidak pernah di dapatkan pada era lampau.³

Pada tahun 1918 Ujung Pandang memperoleh pejabat Walikota (*Burgemeester*) yang pertama. Walikota jugalah yang menjadi ketua dewan kota. Pada 1938 status kota Ujung Pandang berubah menjadi kotapraja (*statsgemeente*) hak-hak pengaturan yang diperluas dan



eng Makkelo. “Menjadi Kota Modern: Tranformasi Kota Ujung Pandang 0”. *Jurnal sejarah*, Vol 1(2), 2018

Basundoro. *Pengantar Sejarah Kota*.(Yogyakarta: Ombak. 2016.). Hlm. 2

eng Makkelo. “Menjadi Kota Modern: Tranformasi Kota Ujung Pandang 0”. *Jurnal sejarah*, Vol 1(2), 2018

jumlah anggota dewan di perbanyak. Bersamaan dengan diperolehnya status *gemeente*, Ujung Pandang di bagi pula menjadi enam distrik, yaitu : Ujung Pandang, Wajo, Melayu, Ende, Ujung tanah, dan Mariso. Semua wilayah ini, kecuali dua terakhir, secara nyata menunjuk asal-usul pemukiman yang bersifat Etnis.⁴

Selanjutnya dari tahun 1947 hingga 1950 Kota Ujung Pandang kembali memiliki Walikota dan dijabat oleh Abdul Hamid Daeng Magassing. Melalui pemilihan, dibentuk pula Dewan Kota pada bulan Agustus 1947. Dari tahun 1952 hingga 1956 kedudukan Walikota Ujung Pandang dijabat oleh Achmad Dara Sjahrudin dari partai Masjumi. Tampilnya A. D. Sjahrudin ini tidak mengejutkan mengingat hasil pemilu lokal yang diselenggarakan pada tahun 1952 untuk mengisi keanggotaan DPRDS tingkat II Kota Ujung Pandang. Pada tahun 1965 hingga tahun 1994 kedudukan Walikota selalu dipegang oleh perwira Angkatan Darat yang dimulai oleh Major M. Dg. Patompo, Letkol. Abustam, Kol. Janci Raib, Kol. Soewahjo. Hanya sekali orang bukan dari Sulawesi Selatan menjabat posisi Walikota Ujung Pandang yaitu Soewahjo.⁵

Pada tanggal 2 Januari 1961, Walikota Aroeppala melantik tiga orang anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) Kotapraja Ujung Pandang. Ini merupakan realisasi dari Penpres No. 6 tahun 1959. Salah seorang yang dilantik itu berasal dari militer Letnan Satu TNI Muhammad Daeng Patompo. Ia, disertai tugas operasional kewalikotaan bidang teknik dan

⁴Dias Pradadimara. 2004. "*Dari Ujung Pandang Ke Ujung Pandang: Proses "Etnisasi" Sebuah Kota*" dalam, Dias Pradadimara Dan Muslimin A. R. Effendy, editor. *Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 188.



⁵Dias Pradadimara. 2005. "*Penduduk Kota, Warga Kota, Dan Sejarah Kota: Kisah Ujung Freek Colombijn, dkk, editor. Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota Di* Jakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 267.

pembangunan. Dg. Patompo, sebagai Anggota BPH Teknik/Pembangunan, mulai membuat berbagai rencana pembangunan.

Salah satunya Sasaran programnya adalah rehabilitasi prasarana dalam kota yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan warga kota. Ia sudah mengenal baik keadaan Kota Ujung Pandang termasuk pengembangannya.⁶ Dalam rangka perluasan dan peremajaan Kota Ujung Pandang, pembangunan kota diarahkan ke daerah pinggiran yaitu mulai dari sebelah utara Jalan Gunung Bawakaraeng dan sebelah timur Jalan Sunu yang mempunyai luas 350 Ha dan diterapkannya Ujung Pandang Plan atau Ujung Pandang Baru sektor kawasan Kota Ujung Pandang terus dibangun dalam sektor fisik dan perluasan wilayah Kota Ujung Pandang.

Pada tanggal 8 Mei 1965, Ia resmi dilantik sebagai Walikota yang definitif. Di depan Sidang Pleno DPRD Kotamadya Ujung Pandang, Patompo menawarkan ide dan programnya untuk mendapatkan masukan-masukan tambahan. Kesamaan bahasa dan persepsi dengan demikian lebih mudah tercipta.

Lahirilah sebuah kerangka kerja yang disusun dalam “Pola Dasar Pembangunan Kotamadya Ujung Pandang” dengan memberantas “3K”, Kemiskinan, Kebodohan, dan Kemelaratan. Dilaksanakan dalam periode yang cukup lama. Dari tahun 1965 sampai tahun 1970. Pada tahun 1965, Ia pun menggulirkan proyek Kota Satelit tersebut. Di belakang hari proyek ini juga disebut Ujung Pandang Baru Plan. Menggunakan areal tanah 6 hektar, di lokasi yang dulunya merupakan desa yang berawa-rawa dan sangat jarang penduduknya, dibangunlah sebanyak sebanyak 33 buah rumah permanen serta 89 “rumah tumbuh” (semi permanen). Semacam yang dikenal dengan Rumah Sederhana (RS) saat ini.⁷



uttaliu dan Andhy Pallawa.1997. “H. M. Dg. Patompo Biografi Perjuangan.”
’ayaan Pembangunan Indonesia. Hlm. 35.

Sejak saat itu pula, Ujung Pandang telah terlibat dalam proses modernisasi yang di pengaruhi oleh Hindia Belanda. Ini mencakup perkembangan perumahan yang teratur dan bersih, penyediaan listrik, keberadaan *Societeit de Harmoni* pertunjukan tarian, pasar malam, pengembangan kanal, pembangunan jalan beraspal, hotel, arsitektur avant-garde, upaya pembersihan, dan penataan desa (kampung *verbetering*) – semuanya ini berkaitan dengan citra modern kota tersebut⁸. Ujung pandang merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat dan berkembang menjadi kota yang sangat besar melebihi kota-kota lainnya. Percepatan perubahan tersebut telah dipicu oleh perkembangan teknologi dan perluasan kota ujung pandang⁹. Pada tahun 1965, H.M.Dg Patompo terpilih sebagai Walikota Ujung Pandang menjadi salah satu pendorong untuk memodernkan kota Ujung Pandang. Visi jangka panjang yang ditawarkan untuk mendorong kota Ujung Pandang menjadi kota yang memiliki lima dimensi yang terletak pada beberapa daerah salah satunya Panakkukang.

Panakkukang adalah bagian dari pada kota madya ujung pandang yang ditetapkan sebagai lingkungan utama salah satunya wisma (Residential Zene) Sebagai suatu lingkungan utama wisma, tentu saja di samping mempunyai kelengkapan fasilitas umum lainnya kebutuhan sehari hari seperti sekolah, tempat peribadatan, Panakkukang perbelanjaan, taman-taman, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Harus pula mempunyai hubungan-hubungan yang lancar dengan lingkungan-lingkungan utama kota lainnya, misalnya terhadap lingkungan-lingkungan utama karya (Industri Zene), lingkungan-lingkungan utama tempat Rekreasi dan Rumah Sakit. Tanpa mengabaikan adanya pola rencana induk pembangunan Kota Ujung Pandang.



ai Bagus Utama. “*Pengantar Industri Pariwisata*”.(Deepublish. 2015.) Hlm.

a Basundoro. *Pengantar Sejarah Kota*.(Yogyakarta: Ombak. 2016.) Hlm. 2

Dalam master plan kota yang telah ditetapkan, bersifat menyeluruh untuk Kotamadya Ujung Pandang. maka khusus Panakkukang Plan yang telah ditetapkan kawasan-kawasan (site plan) yaitu: 1. Kawasan industri, 2. Kawasan pemerintahan, 3. Kawasan rekreasi, 4. Kawasan pariwisata 5. Kawasan perdagangan, 6. Kawasan perwismaan. Semuanya merupakan bagian dari *Garden City*.¹⁰ Wilayah pembangunan Panakkukang Plan direncanakan dan akan dibangun dengan fungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan, kota maupun regional, pusat perkantoran, perdagangan, perbelanjaan, kebudayaan, rekreasi, dan sebagai tempat kediaman utama baik bagi golongan rendah maupun menengah ke atas.

Sementara itu Pada tanggal 5 April 1975 Walikota Patompo menjelaskan dalam sebuah sambutan bahwa pemisahan daerah-daerah pembangunan yang sesuai Master-plan yang mencakup kawasan Industri perdagangan, tempat tinggal – perkantoran, rekreasi dan hiburan. Dalam upaya Ujung pandang yang akan menjadi kota modern maka di wilayah Panakakkukang yang (3 – 4 km dari pusat kota) akan di bangun menjadi sebuah *Garden city* yang mempunyai luas sekitar 4.000. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan ini telah melalui perencanaan yang sangat matang.¹¹

Dalam pusat kegiatan pembangunan kota diletakkan pada pusat pertemuan antara kegiatan industri pelabuhan, kota lama, perumahan baru dan rekreasi. Pusat kediaman direncanakan dalam susunan lingkungan-lingkungan atau *neighbourhood* unit. Setiap *neighbourhood* unit mendasarkan pada satuan Sekolah Dasar dengan radius jarak pelayanan atau *catch ment* area maksimum 300 M. Bagi setiap *neighbourhood* unit membentuk suatu *community unit* dimana kegiatan pelayanan sudah lebih lengkap lagi, misalnya adanya



dg. Patompo. *Rahasia Menyikap tabir Kegelapan: Fragmen Revolusi*

Kota 5 Dimensi dalam Koran *Berita Yudha*. 15 April 1975. Hlm 2

sekolah-sekolah menengah, masjid, lapangan olahraga dan unit perbelanjaan dan kecil wilayah Panakkukang dapat terdiri dari beberapa community yang membentuk kota baru.

Master Plan Pankukkang tidak hanya menjelaskan bagian Panakkukang saja tapi menjelaskan bagaimana pembagian tata kota yang di rancang menjadi beberapa bagian. Wilayah Kec, Mariso. Kec, Ujung tanah, Kec Mamajang, Kec, Bontoala, Kec Ujung Pandang, yang merupakan bagian kota lama. Kec Tello, Kec Tamalanrea, merupakan bagian industri. Kec Tamalate, Kec Rapocini, merupakan bagian Rekreasi, Kec Maggala merupakan bagian perumahan dan, Kec Panakkukang merupakan bagian pusat kegiatan kota.¹²

1.2. Rumusan Masalah

Pengembangan kawasan Panakukkang merupakan bagian dari perluasan Kota Madya Ujung Pandang yang berpengaruh pada kemajuan suatu Kota tersebut. Dapat di liat bahwa pengembangan kawasan Panakkukang sudah di rancang oleh Wali Kota yang menjabat pada saat itu. Untuk menjaga fokus dan konsistensi penulis, dalam hal ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengembangan wilayah Panakkukang Plan pada periode 1970-2000?
2. Bagaimana bentuk kerja sama PT.Timurama bersama pemerintah KotaMadya Ujung Pandang dan bangunan apa saja yang di kerjakan oleh PT.Timurama?



Provinsi Kartografi YA/176, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

1.3. Batasan Masalah

Sebuah tulisan sejarah harus membuat Batas Temporal (waktu) dan Spasial (lokasi). Dalam kajian mengenai kota, batas administratif, ialah yang sering dijadikan dasar strategis penelitian terutama jika menyangkut masalah kependudukan.¹³ pembagian-pembagian suatu tata letak kota harusnya telah di atur. Penulis memberikan batasan spasial kepada master Plan Pengembangan Kawasan Panakkukang, kota madya Ujung Pandang. Penulis memilih Master Plan Kawasan Pengembangan Panakkukang dikarenakan pada perencanaan Pengembangan Kawasan Panakkukang telah di rancang sedemikian rupa yang membuat penulis menjadi penasaran akan apa saja yang akan di bangun pada Kawasan Panakkukang saat itu.

Batasan temporal yang di tentukan dalam tahun 1970-2000. Tahun tersebut dipilih dikarenakan pada tahun 1970, pembangunan dan perluasan Kota Madya sedang marak-maraknya dilakukan dan berakhirnya tahun 2000 karena telah berakhirnya pula rencana pembangunan di Ujung Pandang.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang pola pengembangan batas kawasan Panakkukang
2. Untuk menjelaskan tentang proyek Patompo dan Bangunan apa saja yang telah di kerjakan oleh P.T. Timurama.



ijoyo. *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,

1.5. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu :

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca, khususnya tentang sejarah pengembangan kawasan Panakkukang.
2. Sebagai bahan informasi bagi institusi pendidikan tinggi.
3. Penelitian ini menjadi sumbangan kajian bagi sejarah Kota dan menjadi rujukan untuk keilmuan, dapat dijadikan sebagai literatur dalam penulisan tugas maupun skripsi yang ingin mengenai tema yang sama.
4. Sebagai ilmu dalam lingkup akademis dalam upaya memahami sejarah perkembangan Panakkukang.
5. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru mengenai pengetahuan yang sudah ada sebelumnya terkait tema yang sama.
6. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan membuat para akademisi untuk melakukan penyelidikan sumber yang lebih mendalam.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Relevan

Buku *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen Revolusi Pembangunan)* oleh H.M. dg. Patompo menjelaskan sepeti apa kota Ujung Pandang pada tahun 1960-an dan perencanaan kota Ujung Pandang dalam rehabilitas serta pengembangan wilayah periode Patompo. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Patompo.¹⁴

Buku H.M. dg. Patompo Biografi perjuangan yang di tulis oleh Abdurrazaq Mattaliu



erjalanan H.M. dg. Patompo sebagai wali kota Ujung Pandang, dimana

dg. Patompo, 1976. *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan (Fragmen pembangunan)*. Ujung Pandang

program-program kerja yang dijalankannya seperti pembangunan fisik kota, sosial, dan ekonomi. Rencana jangka panjang bertujuan untuk mengembangkan kota Ujung Pandang menjadi sebuah kota lima dimensi yang mencakup: kota datang, kota budaya, kota industri, kota akademik, dan kota pariwisata.¹⁵

Jurnal menjadi kota modern: Transformasi pada Abad ke-20 oleh Ilham Daeng Makkelo menjelaskan modernitas dan perencanaan pembangunan kota Ujung Pandang dari masa kolonial hingga akhir abad ke-20. Pengaruh konsep perencanaan kota sangat dipengaruhi oleh perencanaan kota yang populer di Eropa. Sektor ekonomi berkembang sejalan dengan proses modernitas di perkotaan. Kota modern bahkan telah mengalami penurunan dan memberikan prioritas pada fungsi-fungsi jasa yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi modern.¹⁶

Jurnal Penyeragaman dan wajah buram modernitas di Kota Ujung Pandang pada masa Orde Baru oleh penulisnya di tentang modernitas di Kota Ujung Pandang sebagai ide atau gagasan modern dalam bentuk proyek-proyek pembangunan, yang berusaha dikendalikan negara yang diwujudkan dalam bentuk penyeragaman dan mobilisasi proyek-proyek, dalam pembangunan oleh pemerintah kota. Namun, pembangunan kota ini berdampak pada permasalahan kota, yakni lingkungan fisik perkotaan dan kehidupan sosial penduduk kota.¹⁷

1.6.2 Landasan Konseptual

Secara geografis, kota dapat diartikan sebagai suatu wilayah satu tempat yang terdiri dari padatnya jumlah penduduk, tempat bermukimnya penduduk, menjadi satu tempat untuk



zaq Mattaliu.1997. H. M. Dg. Patompo Biografi Perjuangan.

aeng Makkelo. Menjadi kota modern: transformasi kota Ujung Pandang pada *al sejarah*, Vol 1(2), 2018

2019. Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Ujung Pandang Baru. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 1.

menjalankan kegiatan perekonomian serta adanya batasan kewenangan pemerintah yang dibatasi oleh suatu batas wilayah administrasi suatu kota.¹⁸

Kota merupakan suatu pusat kegiatan bagi masyarakatnya. Aspek fisik dari sebuah kota mencakup sarana, prasarana, dan Infrastruktur yang mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perkembangan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan perumahan dapat menyebabkan perubahan lingkungan kota. Kemajuan teknologi juga merupakan penyebab utama pendirian industri-industri di sebuah kota.¹⁹ Sistem perkotaan yang baik terkait dengan perkembangan konsep kota, seperti kota pariwisata sebagai daya tarik wisatawan, kota industri sebagai pusat industri dan produksi, dan Masih banyak lagi konsep-konsep kota lain yang sesuai tujuan dan fungsinya masing-masing.

Perubahan pertumbuhan ekonomi yang drastis tentunya menyebabkan kota mengalami perubahan fisik dan manajemen yang signifikan sehingga perkembangan berbagai konsep kota tentunya menjadi daya tarik bagi wisatawan.²⁰

1.7. Metode Penelitian

Heuristik: Dalam melakukan penelitian terlebih pada penelitian sejarah, metode heuristik atau pengumpulan sumber sangat diperlukan sebagai langkah awal sebuah penelitian. Peneliti atau penulis diharuskan mengumpulkan sumber primer berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan pengembangan Panakkukang pada tahun 1970 sampai 2000 yang dapat di

¹⁸Muhammad Iqromarta. *Kajian Pola Perkembangan Perkotaan Berdasarkan Morfologi Kota di Perkotaan Taliwang*. Mataram. 2022



aeng Makkelo. *Menjadi kota modern: transformasi kota Ujung Pandang pada sejarah*, Vol 1(2), 2018

asrullah Jamaludin. *Sosiologi Perkotaan : Memahami Masyarakat Kota dan* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017). Hal. 50

peroleh dari badan arsip dan perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan kemudian mengumpulkan sumber-sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, koran, yang menjadi bahan rujukan penulis yang dapat di peroleh dari perpustakaan.

Kritik Sumber: Setelah sumber-sumber dikumpulkan, peneliti kemudian harus melakukan kritik terhadap sumber yang didapatkannya. Kritik ini terbagi menjadi dua cara yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern ialah kritik yang ditujukan pada isi yang ada atau disampaikan dalam sumber (arsip dokumen, foto, laporan, dan sumber lainnya), sedangkan kritik ekstern merupakan kritik yang ditujukan pada fisik sumber yang dapat dilihat dari bentuk atau wujud sumber tersebut.

Interpretasi Setelah melakukan pengumpulan sumber dan melakukan kritik pada sumber yang telah dikumpulkan, peneliti kemudian diharuskan menyusun sumber yang ada secara sistematis agar memudahkan peneliti melihat kekurangan dan kelebihan sumber yang dimiliki untuk memulai penulisan atau tahap akhir dari metode penelitian.

Historiografi Setelah melakukan tiga metode awal diatas, penulis kemudian akan melakukan proses penulisan berlandaskan metodologi penulisan sejarah. Hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam penulisan ini ialah cara penulisan, pemaparan data, serta laporan hasil penelitian.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam proses melakukan penelitian sejarah, penting untuk mengikuti struktur penulisan yang teratur. Tujuannya adalah agar penyajian informasi lebih terstruktur. Penulis

tulisan ini dalam lima bab, yang tertera sebagai berikut :



BAB I : berisi tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pendekatan konseptual, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : membahas gambaran umum tentang wilayah Panakkukang dan rencana pembangunan Kota Madya Ujung Pandang serta menjelaskan kebijakan pembangunan yang diterapkan di Kota Madya Ujung Pandang.

BAB III : menjelaskan bagaimana pengembangan tata ruang dan batas-batas kawasan Panakkukang dan membahas perencanaan pengembangan kawasan Panakkukang tersebut, juga infrastruktur wilayah Panakkukang.

BAB IV : ini akan di membahas mengenai perusahaan pengembangan wilayah Panakkukang dan kerja sama proyek timurama dan pola rencana wilayah juga lokasi rencana wilayah pengembangan bangunan-bangunan yang di kerjakan oleh pt timurama

BAB V : ini merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan berupa hasil yang menjelaskan atas semua pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.



BAB II

Gambaran Umum Wilayah Panakkukang

2.1.Rencana Pembangunan Kota Madya Ujung Pandang

Kota Madya Ujung Pandang mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas. Dengan kata lain, wilayah Kota Ujung Pandang berada pada koordinat 119° Bujur Timur dan 5,8° Lintang Selatan, dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Ujung Pandang merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-50 ke arah barat, diapit dua muara Sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah Kota Madya Ujung Pandang tercatat 175,77 Km² yang meliputi 14 Kecamatan. Kota Madya Ujung Pandang berbatasan dengan: Sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa dan, sebelah barat dengan Selat Ujung Pandang. Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 77%, temperatur udara sekitar 26,2°-29,3°c, dan rata-rata kecepatan angin 5,2 knot²¹.

Rencana pembangunan Kota Ujung Pandang pada masa pemerintahan H.M. Dg. Patompo sebagai Wali Kota, akan dielaborasi secara komprehensif di Bab ini. Penulis akan membahas langkah-langkah yang telah dipersiapkan untuk mengembangkan dan memajukan kota Ujung Pandang ke arah masa depan yang lebih maju dan rencana pembangunan yang telah di rencanakan, sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat serta mengatasi tantangan yang

sa datang.



Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja. Berbagai dimensi seperti, elemen-elemen Sosial, Budaya, Ekonomi serta lingkungan yang secara bersamaan akan membentuk wajah Kota Ujung Pandang. Dengan begitu, diharapkan memperoleh pemahaman mengenai cara pemerintah Kota Ujung Pandang berencana dan mewujudkan potensi serta manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui bab ini, akan dijelaskan sebagai tahapan perkembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan yang membentuk wajah kota Ujung Pandang, seperti yang sekarang ini terjadi. Memahami rencana pembangunan ini memungkinkan kita dapat mendalami mengenai bagaimana langkah-langkah pada periode tersebut yang telah membuat dasar serta pedoman untuk perencanaan pembangunan pada masa kini yang lebih modern dan berkesinambungan.

2.2 Kota Ujung Pandang Pada Masa Pemerintahan Patompo

Perkembangan suatu kota tidak lepas pada persoalan ketersediaan lahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lancarnya operasional kota sangat bergantung pada fasilitas infrastruktur yang akan mendorong berbagai aktivitas masyarakat kota. Kota Ujung Pandang yang terletak pada wilayah pesisir dan dataran rendah memberi kesempatan bagi kemajuan wilayahnya, serta mendapat kesempatan tumbuh menuju kota modern. Keterhubungan antara kota dan infrastruktur memiliki daya hubung yang kuat. Oleh karena itu, dalam proses kemajuan perkotaan sangat penting untuk terus mengikuti dan memperhatikan kemajuan fasilitas infrastruktur yang telah ada.

Dalam Tahun 1965 tata ruang kota Ujung Pandang mengalami perubahan pada masa alikota H. M. Dg. Patompo. Patompo mengundang seorang ahli kota dari yang bernama Mr. Anderson. Patompo sebagai militer pada masa itu, ram kerjanya dengan cara komando yang di dasari dengan kebijakan yang



telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.²² Dalam menjalankan amanat untuk melaksanakan pembangunan kota Ujung Pandang, Patompo menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi (KISS), guna menjamin keselarasan antara pola pembangunan kota Ujung Pandang, Regional, dan Nasional.

Harapan dari pemerintah kota Ujung Pandang dengan pola pembangunan yang telah ditetapkan bisa menjadi kenyataan. Pemerintah kota mengaminkan bahwa pola pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang di rencanakan dapat menjadi hal baik. Hal ini diinginkan karena Kota Ujung Pandang memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.²³ Dasar utama pembangunan kota Ujung Pandang ialah Pancasila dan konstitusi Undang - Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan konstitusional bagi pengembangan fisik, aspek mental dan spiritual, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang²⁴.

Gubernur Sulawesi pada tahun 1966 Selatan yakni Ahmad Lamo yang menjabat pada waktu itu. Situasi ini mendorong perubahan menuju Orde Baru melewati Rezim Orde Lama. Ahmad Lamo merupakan salah satunya adalah tentara yang memiliki hubungan erat dengan Jakarta.²⁵ Fokus utama dalam pembangunan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan mendesak rakyat dalam zona jangka pendek, seperti yang di cantumkan pada TRITURA.²⁶ Meskipun tiga

²²Ilham. “penyeragaman dan wajah buram modernitas di kota Ujung Pandang pada masa Orde Baru”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol 4. N0, 2019. Hlm. 17

²³Inventaris Arsip Kotamadya Ujung Pandang Volume 1 (1926-1988) “Penjelasan Walikotamadya Ujung Pandang tentang pola pembangunan Daerah.

²⁴ H. M. Dg. Patompo. *Rahasia menyikap tabir kegelapan: Fragmen Revolusi Pembangunan*. (Ujung pandang: percetakan SMP Frater Ujung pandang 1976). Hlm 27



Iujahidin Fahmi dkk “Pasang Surut Polarisasi Elit di dalam Enis Bugis dan . *Solidality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 06, No, 02, 2012. Hlm 186.

merupakan singkatan dari “tiga tuntutan rakyat” yang merupakan tuntutan isiswa dan masyarakat Indonesia pada peristiwa demonstrasi besar-besaran a tahun 1966.

tuntutan tersebut bersifat nasional, peran di daerah menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.

kondisi politik Kota Ujung Pandang pada Tahun 1967 masih dalam keadaan kondusif, seperti yang telah di jelaskan oleh H.M. Dg. Patompo, bahwa pada tahun 1967 khusus tugas-tugas pemerintah kota dirasa tahap rehabilitasi telah selesai. Maka mulailah kami merencanakan pembangunan di segala bidang. Memulai pembangunan yang telah di terapkan, bukan hanya sekedar membangun semua bangunan, tetapi di dasari pada perencanaan yang teliti. Pemahaman yang lebih mendalam, dan imajinasi terhadap konsep pembangunan tersebut.²⁷ Setelah melalui periode tersebut pemerintah Kota Ujung Pandang melakukan penyusunan rencana pembangunan berbagai fasilitas kota yang dibutuhkan guna untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kota Ujung Pandang yaitu kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan.²⁸



g. Patompo. *Op. cit.* Hlm. 25

n. 27



Gambar 2.1 H.M. Dg. Patompo (Walikota Ujung Pandang Periode 1965-1978) (Sumber : H.M. Dg. Patompo, *Rahasia Menyikap Tabir Kegelapan : Fragmen Revolusioner Pembangunan. Ujung Pandang : Percetakan SMP Frater Ujung Pandang. 1976*).

Sementara itu pola rencana pembangunan lima tahun kota Ujung Pandang dikenal dengan 3k untuk memberantas kemiskinan, kemelaratn, dan kebodohan.²⁹ Rencana pemerintah Kota Ujung Pandang dan pemerintahan pusat selalu selaras. Hasil dari rencana pembangunan jangka pendek dapat dilihat di lapangan pekerjaan itu telah bermunculan, perekonomian telah bergerak maju, dan pembangunan-pembangunan fasilitas umum dibangun di berbagai lokasi di Ujung Pandang.

Dengan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kemiskinan, kemelaratn, dan

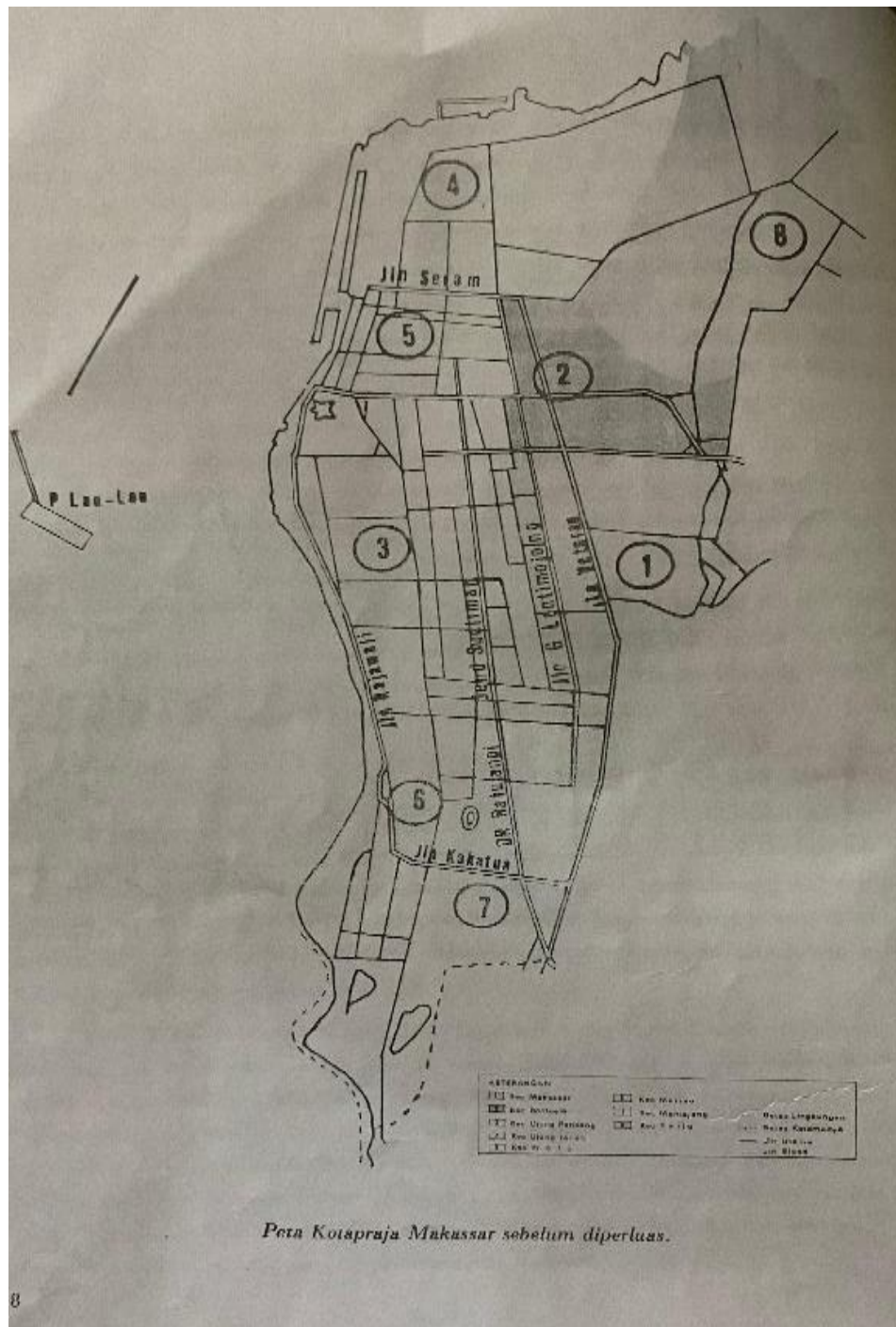


Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah telah mencapai langkah awal yang

...n.27

sangat penting bagi kemajuan pembangunan. Langkah lain yang dilakukan setelah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ujung Pandang serta tercapainya kehidupan yang layak selaras dengan sasaran dari program 3k. Kehidupan yang layak dalam konteks tersebut dapat diartikan dengan keadaan di mana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan cukup, termasuk aspek-aspek seperti lapangan pekerjaan, ketersediaan perumahan yang mencukupi, ketersediaan air minum dan listrik yang cukup, kesehatan dan pendidikan yang memadai. fasilitas pembangunan yang cukup bagi masyarakat, serta tempat hiburan yang memadai.





Gambar 2.2 Peta Kotapraja Ujung Pandang sebelum diperluas Tahun 1971

(Sumber : H.M. Dg. Patompo, *Rahasia Menyikap Tabir Kegelapan : Fragmen Revolutioner Pembangunan. Ujung Pandang : Percetakan SMP Frater Ujung Pandang. 1976*).



bar di atas merupakan peta Ujung Pandang sebelum ada perencanaan Ujung Pandang, yang akan digaungkan oleh Walikota H.M. Dg. Patompo.

n pembangunan merupakan mimpi besar dari Walikota untuk masyarakat

Ujung Pandang pada saat itu. Gambar di atas pula menjelaskan pembagian Kota Ujung Pandang yaitu, (1) kecamatan Ujung Pandang, (2) kecamatan Bontoala, (3) kecamatan Ujung Pandang, (4) kecamatan Ujung Tanah, (5) kecamatan Wajo, (6) kecamatan Mariso, (7) kecamatan Mamajang, (8) kecamatan Tallo. Adapun kedelapan kecamatan tersebut merupakan kecamatan Ujung Pandang sebelum adanya perluasan.

Terwujudnya masyarakat yang memiliki kebutuhan hidup yang cukup dalam, langkah menuju pembangunan jangka pendek bisa dikatakan berhasil dicapai oleh pemerintah. Dalam membuka jalan menuju pencapaian tujuan pembangunan kota jangka panjang, dapat dimulai dengan melihat visi perencanaan yang bertujuan dikenal dengan “konsep kota 5 dimensi”, mencakup: Kota Akademik, dan Kota Pariwisata. Garis besar kota lima dimensi ini merupakan terobosan baru untuk mewujudkan kota metropolitan, karena dapat menjamin terwujudnya tujuan dan impian kota lima dimensi ini dari strategi, politik, dan ekonomi.³⁰

Pemerintah Kota Ujung Pandang mengupayakan untuk peningkatan dan perbaikan hidup bagi masyarakatnya. Terutama yang ada di desa-desa serta tempat-tempat terpencil yang belum dapat perhatian khusus dari pemerintah dan masih jauh dari kata terpenuhinya fasilitas yang ada di kota³¹. Maka dari itu Pemerintah Kota Ujung Pandang membuat suatu program yang bernama Gerakan Masuk Kampung (GMK). Gerakan ini merupakan sebuah master Plan yang upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di desa-desa, gang-gang sempit, serta daerah yang belum dapat diakses dengan mudah dan jauh dari fasilitas perkotaan yang tersedia. Langkah ini merupakan impian yang diinginkan oleh Patompo terhadap desa-desa setelah berkunjung ke Kota London. Patompo terinspirasi dengan pengaturan pemukiman kumuh di Kota-kota Inggris.³²



g. Patompo. *Op.cit.* Hm. 31

n. 31

Maeng Makkelo. “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Ujung Pandang 0”. *Jurnal Sejarah*, vol. 1 (2). 2018. Hm. 55

Master Plan yang di rancang oleh pemerintah Kota Ujung Pandang memiliki sasaran ialah mengkotakan desa, atau membentuk suatu kota baru. Dalam penyusunan dasar rencana *master plan* kota Ujung Pandang, juga membentuk tim yang terdiri dari anggota UGM-UNHAS ikut dalam partisipasi tersebut.³³ Pembangunan kota Ujung Pandang dirancang secara bertahap dan terrencanakan melalui penerapan *Master Plan* kota Ujung Pandang. Perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk membentuk sebuah kota baru dengan fokus pada pemajuaan desa-desa, yang pada akhirnya memungkinkan penduduk pedesaan menikmati fasilitas perkotaan yang mudah didapatkan.

Berdasarkan pada *master plan* yang telah dirancang, pembangunan Kota Ujung Pandang baru di rancang dengan dua proyek besar yaitu ujung pandang *plan* dan Panakkukang *plan*. Pada tahun 1965, pemerintah kota Ujung Pandang memulai mengerjakan pembangunan kota Ujung Pandang dengan membangun fisik di bagian timur laut pusat kota yang di kenal dengan ujung pandang *plan* atau kata lain ialah ujung pandang baru.³⁴ Lahan yang di pergunakan seluas 6 hektar digunakan untuk pelaksanaan ujung pandang *plan*, di atas lahan tersebut telah dibangun fasilitas-fasilitas seperti puskesmas, 33 unit rumah permanen, 89 unit rumah semi permanen, masjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar, bioskop, lapangan olahraga, dan juga telah siapkan area untuk pasar-pasar. Pada lahan ini pula didirikan kantor kecamatan beserta rumah dinasny melalui penggunaan dana dari program inpres. Dahulu daerah ini merupakan daerah yang ditumbuhi rawa dan rumput-rumput panjang yang hanya sedikit di huni oleh masyarakat, kini daerah ini telah bertransformasi menjadi sebuah kota baru.³⁵

Kota Ujung Pandang terbagi menjadi beberapa bagian, kota lama sebagai kawasan perdagangan, kawasan Panakkukang atau Panakkukang *Garden City* sebagai kawasan



n. *Menemukan Ujung Pandang di lorong waktu*. (Ujung Pandang, penerbit Hlm. 9

g. Patompo. *Op. cit.* Hlm. 32

n. 33

perkotaan dan pemukiman masyarakat, kawasan biringkanaya timur sebagai kawasan industri. Daerah Mariso, dan pulau-pulau di sekitar selat Ujung Pandang menjadi kawasan pariwisata. Kawasan yang dulunya menjadi lahan pertanian kini berubah menjadi kawasan pemukiman, dan perkantoran, tambak dan rawa kini telah menjadi bangunan industri.³⁶

Pada masa pemerintahan Patompo sektor pariwisata mulai diperhatikan dan di benahi. Kawasan pantai losari menjadi salah satu tempat yang paling ramai di kunjungi oleh warga kota maupun luar kota. Tujuan dari pembangunan ialah untuk menyediakan sarana dan prasarana kota yang mempermudah masyarakatnya, kelancaran komunikasi, sarana pendidikan, kesehatan, sarana pedesaan, dan perumahan. Fasilitas kota juga yang dapat menawarkan infrastruktur yang modern yang terbilang dalam standar internasional. Perkembangan perkotaan semakin menunjukkan hasil yang di tandai dengan terwujudnya peningkatan ruang kota. Tidak hanya berbicara mengenai masalah fisik kota yang modern, tetapi juga mempengaruhi masalah sosial yang terdapat di sekitarnya.³⁷

Pada akhir masa pemerintahan Walikota Patompo, kota Ujung Pandang telah mengalami transformasi menjadi kota yang teratur dengan fasilitas-fasilitas menyerupai fasilitas yang berada di kota modern. Semua sarana yang di anggap penting bagi kehidupan masyarakat perkotaan telah disediakan dan diperhatikan. Infrastruktur perkotaan, pasar, pusat bisnis, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas sosial, tempat rekreasi, tempat hiburan, dan berbagai fasilitas lainya yang telah didirikan. Di beberapa tempat juga telah didirikan berbagai jenis kegiatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam era perkotaan modern.³⁸



aid “Perubahan Fungsi Lanskap terhadap peningkatan Temperatur Udara di a Ujung Pandang”. *Jurnal Arsitektur, Kota dan Pemukiman (LOSARI)*. Hlm.

aeng Makkelo. *Op. cit.* Hlm. 58

n. 21

2.3 Kebijakan pembangunan kota Ujung Pandang

Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Ujung Pandang, walikota pada waktu itu ialah Patompo menerapkan langkah-langkah, seperti, (*planning*) perencanaan, (*staffing*) staf, (*budgeting*) anggaran belanja, (*controlling*) pengontrolan, dan (*evaluating*) evaluasi.³⁹ Pembangunan Kota Ujung Pandang menyebar dengan cepat dari akhir 1970-an sampai dengan 1980-an, dan ketika pembangunan gedung administrasi besar dibangun di setiap ibukota provinsi.⁴⁰ Pemerintah kota beranggapan bahwa luas wilayah kota belum cukup untuk melindungi masyarakat yang berkembang dan pertumbuhan penduduk yang makin padat. Pada tahun 1967 tanggal 7 Juli, terjadi persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ujung Pandang mengenai usulan perluasan wilayah Kota Ujung Pandang sebagai pusat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.⁴¹ Melalui rapat yang telah diselenggarakan DPRD Kota Ujung Pandang tanggal 4 September 1967, Walikota Ujung Pandang mendesak pemerintah Provinsi untuk segera melaksanakan perluasan wilayah Kota Ujung Pandang. Proses perluasan Kota Ujung Pandang mendapat sejumlah dinamika terkait batas wilayah dengan daerah-daerah yang akan di masukkan menjadi wilayah kota Ujung Pandang.

Pada tahun 1968 tanggal 31 Januari, telah dikeluarkan keputusan oleh Gubernur Sulawesi Selatan mengenai pembentukan sebuah tim penyelesaian untuk mengatasi sengketa perbatasan wilayah daerah, tim tersebut di pimpin oleh Drs. J. Salusu (B.P.H. Pemerintah) kemudian pada tanggal 5 Juni telah diadakan pertemuan DPRD Kota Ujung Pandang untuk



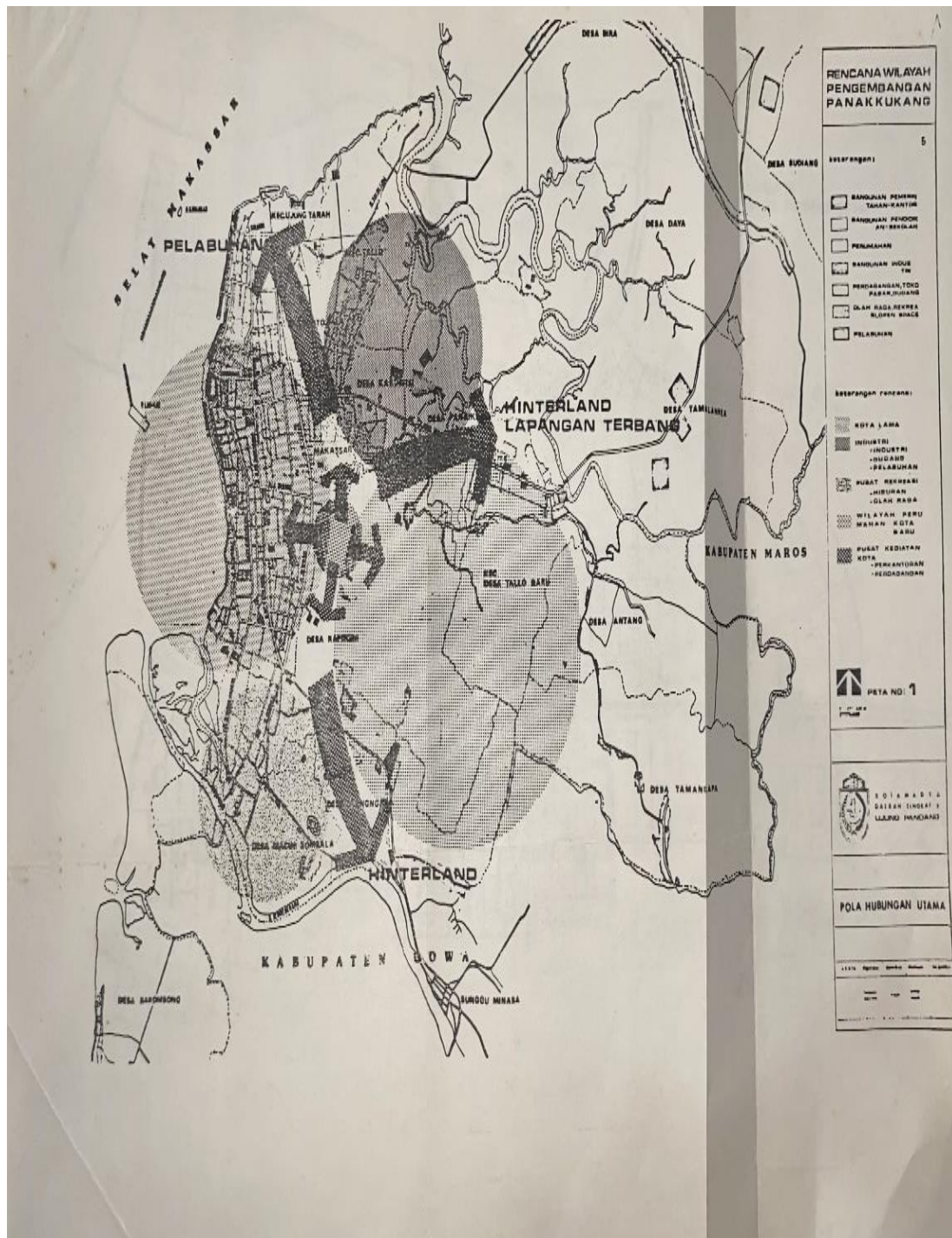
3. Patompo. *Op. cit.* Hlm.42

m. 58

Akbar Abdullah, dkk. "Perpindahan karena perluasan: Masuknya mangasa kota Ujung Pandang 1972". *Jurnal Panttingalloang*, Vol. 5 No. 4, 2018. Hlm.

menerima penjelasan dari tim penyelesaian mengenai perselisihan batas wilayah antara Ujung Pandang dan Gowa. Pada tahun 1970 tanggal 28 Februari, telah diterbitkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 60/II/70, yang mengatakan bahwa pembentukan sebuah panitia kerja bertujuan untuk melaksanakan perluasan ibukota provinsi.⁴²





Gambar 2.3 Peta Perencanaan Pembangunan Kota Ujung Pandang Sesudah Perluasan Tahun 1970-an

(Sumber : Arsip Provinsi Kartografi YA/176, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan)



a itu perencanaan untuk memperluas wilayah Kota Ujung Pandang pada menuai kemajuan karena dapat di liat dari peta di atas yang menggambarkan

bahwa Ujung Pandang akan di perluas sesuai dengan Master Plan yang telah di buat oleh H.M. Dg. Patompo, yang menjabat sebagai Walikota pada masa itu. Dalam perencanaan Master Plan pada wilayah Kota Ujung Pandang dapat diliat bahwa pembagian wilayah telah ada yaitu (1) wilayah Kota lama, (2) wilayah Industri, (3) wilayah pusat rekreasi, (4) wilayah perumahan kota baru, (5) wilayah pusat kegiatan kota. Dapat diliat bahwa pembagian wilayah yang telah dirancang ini membuat wajah Kota Ujung Pandang lebih tertata dari pada wajah kota lama.

Setelah Kota Ujung Pandang melalui beberapa fase dan persiapan yang telah dijalankan oleh pemerintah kota, pada tahun 1971 telah diterbitkan peraturan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 mengenai perubahan Batas-batas wilayah antara Kota Ujung Pandang dan Kabupaten Gowa , Kabupaten Maros, dan Kabupaten pangkajene dan kepulauan di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu pada tanggal 1 September 1971, Kota Ujung Pandang telah diperluas ke arah utara (Kabupaten Maros) dan timur (Kabupaten Gowa), memperluas wilayah Kota yang dulunya hanya 21 km persegi hingga menjadi 175 km persegi. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan pergantian nama dari Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Kotamadya Ujung Pandang sebagai sebuah perwujudan dari permintaan penduduk dan pemerintah Kota sendiri,

Semenjak pemekaran yang di lakukan pada tahun 1970-an fungsi lansekap Kota Ujung Pandang telah banyak mengalami perubahan seperti perbaikan gedung-gedung tua dan pembangunan sarana dan prasarana baru.⁴³ Pemerintah Kota Ujung Pandang mendahulukan kebijakan yang mengutamakan aspek modernitas; jalan-jalan di perluas, pasar-pasar dibangun, perencanaan pengembangan mencakup daerah pinggiran dan membentuk hiburan yang lebih bebas.⁴⁴



Said “Perubahan Fungsi Lansekap terhadap Peningkatan Temperatur Udara Kota Ujung Pandang”. *Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman LOSARI* .

aeng Makkelo. *Op. cit.* Hlm. 56

Dalam rangka mewujudkan konsep Kota 5 Dimensi, pemerintah Kota Ujung Pandang telah menerapkan beberapa kebijakan. Sebagai pilar hukum yang akan menjelaskan *Master Plan* tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 2/1971 yang membahas tentang perencanaan kota Ujung Pandang dalam aspek fisik, sosial, ekonomi.⁴⁵ Pada tingkat Nasional, pemerintah pusat telah menunjuk Kota Ujung Pandang sebagai pusat utama pengembangan dan pembangunan wilayah di Indonesia timur melalui panduan dalam PELITA Nasional.

Tantangan mulai bermunculan ketika wilayah yang semula direncanakan dalam *Master Plan* sebagai pusat hiburan, seni, dan pariwisata untuk mendukung konsep Kota budaya seperti Tanjung Bunga, Tanjung Alam, dan sekitarnya, akhirnya tidak berhasil dijalankan sesuai rencana awal yang telah dipikirkan. Pada tahun 1973, kawasan tersebut diserahkan kepada pihak swasta, yaitu PT. Sulawesi Tourism Development. Untuk mengembangkan area rekreasi “Delta Remaja” di Tanjung Bunga dan Tanjung Alam. Pada tahun 1976, pemerintah Kota Ujung Pandang merekomendasikan PT. Mataba Karya dipimpin oleh Andi Mattalatta untuk mengelola kawasan tersebut sebagai pusat hiburan dan kawasan wisata⁴⁶.

Sedangkan pada tahun 1984 tanggal 14 Juli Walikota Ujung Pandang membuat pembentukan kelompok kerja panitia inventarisasi tanah dan bangunan, kelompok ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu (1) kelompok kerja inventarisasi, kelompok kerja inventarisasi bangunan, dan kelompok kerja inventarisasi tanah tumbuh⁴⁷. Ini di buat agar perencanaan jangka panjang dan jangka pendek Kota Ujung Pandang tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan.



Said. *Loc. cit*

Op. cit. Hlm. 21-22

Kota Ujung Pandang Nomor 36 (Dinas Kearsipan Kota Ujung Pandang
)